

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH KABUPATEN  
BANTAENG**

**ANNISAA KHUSNUL KHATIMAH**

**E011171515**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ABSTRAK**

**ANNISAA KHUSNUL KHATIMAH. E011171515. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng.  
(Di bimbing oleh Dr. Hj. Syahribulan, M.Si dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si.)**

Tujuan Penelitian (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pelibatan masyarakat (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pelibatan masyarakat.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan dan saran melalui wawancara terhadap suatu persoalan, memerlukan penjelasan dan penafsiran terhadap data dan informasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan Bank Sampah Induk ButtaToa Bantaeng.

Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng belum berjalan maksimal terutama pada aspek lingkungan sosial dalam hal partisipasi masyarakat yang masih kurang sehingga manfaatnya belum dirasakan secara menyeluruh. Meskipun Stakeholder dan Agen Pelaksana telah memahami tujuan dan sasaran dari program Bank Sampah, namun sosialisasi ke masyarakat masih dinilai kurang optimal.

Kata Kunci : Bank Sampah, Implementasi, Kebijakan



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ABSTRACT**

**ANNISAA KHUSNUL KHATIMAH. E011171515. Policy Implementation of Waste Bank Management at Bantaeng Regency (Mentored by Dr. Hj. Syahribulan, M.Si and Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si.)**

Research Objective (1) To know and describe the implementation of waste management policy through community involvement (2) To know and describe the factors that influence the implementation of waste management policy through community involvement.

This type of research uses qualitative descriptive research methods to provide a systematic, factual and accurate picture of the data in the field and advice through interviews on an issue, requiring explanation and interpretation of data and information. This research was conducted in the Environment Office of Bantaeng Regency and Bank Sampah Induk ButtaToa Bantaeng.

The results of research on the implementation of waste management policy through community involvement in Bantaeng regency have not been running optimally, especially in the social environmental aspects in terms of community participation that is still lacking so that the benefits have not been felt thoroughly. Although stakeholders and implementing agents have understood the objectives and objectives of Bank Sampah program, socialization to the community is still considered less than optimal.

Keyword : Waste Bank, Implementation, Policy



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Annisaa Khusnul Khatimah  
NIM : E011171515  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng

Adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan

Annisaa Khusnul Khatimah



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Annisaa Khusnul Khatimah  
NIM : E011 171 1515  
Program Studi : Ilmu Administasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah  
Kabupaten Bantaeng

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

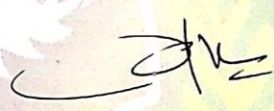
Makassar, 30 Juli 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,

  
Dr. H. Syahribulan., M.Si  
NIP 19600914 198702 2 001


Pembimbing II,

  
Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si.  
NIP 19720507 200212 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,



  
Dr. Nurdin Nara, M.Si.  
NIP. 19630903/198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Annisaa Khusnul Khatimah  
NIM : E011 171 1515  
Program Studi : Ilmu Administasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah  
Kabupaten Bantaeng

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Juli 2021


Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Hj. Syahribulan, M.si

Sekretaris : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si

Anggota : 1. Dr. H. Muhammad Yunus, MA

2. Amril Hans, S.A.P., MPA

()

()

()

()

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliyaan menuju alam yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun Penulis telah mengupayakan memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, karena itu penulis dengan senang hati menerima kritikan, koreksi maupun saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan berikutnya.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta Syamsuddin dan Ibunda tercinta Hardinar, demikian pula kepada saudara penulis Ahmad Abrar dan Ahmad Kurnia yang telah memberikan dukungan kepada penullis selama ini

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai berbagai pihak, karena itu penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;
3. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Publik.
4. Dr. Hj. Syahribulan, M.si selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P. selaku pembimbing 2, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Yunus, MA dan Bapak Amril Hans, S.A.P., MPA selaku tim penguji. Terimakasih atas waktu, masukan serta arahannya.
6. Para dosen Program Studi Administasi Publik UNHAS terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan, serta staf akademik (Ibu Ros, Ibu Darma, dan Pak Lili) yang telah membantu penulis dalam pengurusan kelengkapan administratif penulisan skripsi
7. Para Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaptenn Bantaeng yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian
8. Para Pengurus Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.



9. Terima kasih pada Wisnu telah hadir di waktu yang tepat. Terima kasih sudah menjadi moodboosterku. Hidup itu tentang berjuang, so don't stop to fight. Mari berjuang demi mengurangi jarak.
10. Sahabat Una, Huron, dan Reni yang juga sama sama berjuang menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk tetap semangat, yuk bisa yuk. Kalau kata reni, semua akan sarjana pada waktunya. Semoga kata-kata itun diwujudkan bukan hanya melalui do'a.
11. Terimakasih kepada teman seperjuangan dikampus "geng syantik" Reviva, Ayu, Wulan, Nisa, Musda, Diah, Feby, Siska, Niken, Riska dan Vinka sudah menemani dan mewarnai selama proses perkuliahan di kampus semoga kalian sukses. Semangat juga untuk kalian yang berjuang mengerjakan skripsinya dan selamat juga untuk Feby pembuka geng yang sudah sarjana. Terima kasih juga kalian yang hadir menemani hingga saat ini hingga wawasan perlambean diriku bertambah luas.
12. Terima kasih pula pada teman-teman dance UKM SENI TARI FISIP UNHAS Febi, Musda, dan Ayu a.k.a *Blackink* senantiasa tampil di *event* bersama-sama yang disatukan karena hobi dan kecintaannya terhadap Korea.
13. Teman-teman *Leader 2017 (Loyalty & Educated of Administrative Generation)* terimakasih atas segala bantuan dan perhatian yang di berikan selama proses perkuliahan. Jangan pernah berhenti untuk dibenci, semangat. *We are leader hu hu ha ha.*

14. Terimakasih kepada Segenap keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS, RELASI12, RECORD13, UNION14, CHAMPION15, FRAME16 dan LENTERA18.
15. Terimakasih kepada Spotify karena telah hadir memberikan motivasi dan menghibur penulis dikala suntuk dalam mengerjakan skripsi.
16. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah sampai pada titik ini. Yang telah berjuang melawan pertarungan ego untuk tidak bermalas-malasan. Ini menjadi bukti bahwa kau bisa menang dipertarunganmu sendiri untuk selangkah lebih maju pada pertarungan selanjutnya. Semangat berjuang untuk diri sendiri, teruslah upgrade dirimu ke yang lebih baik.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung maupun mendoakan penulis selama ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi para pembaca. Akhir kata, Penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Makassar, 30 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
----------------------------	----------

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ASBTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>16</b>
I.1    Latar Belakang.....	16
I.2    Rumusan Masalah.....	22
I.3    Tujuan Penelitian .....	22
I.4    Manfaat Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
II.1    Kebijakan Publik .....	24
II.1.1    Pengertian Kebijakan Publik.....	24
II.1.2    Tahapan Kebijakan Publik .....	25
II.2    Implementasi Kebijakan Publik .....	27
II.2.1    Pengertian Implementasi Kebijakan .....	27
II.2.2    Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi .....	29
II.2.3    Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan .....	34
II.2.4    Model Implementasi Kebijakan Publik .....	35
II.3    Pengelolaan Sampah melalui Pelibatan Masyarakat .....	48
II.3.1    Konsep Pengelolaan Sampah .....	48
II.3.2    Konsep Pelibatan Masyarakat .....	50
II.4    Kerangka Pikir .....	53

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
III.1 Pendekatan Penelitian .....	54
III.2 Lokasi Penelitian .....	54
III.3 Fokus Penelitian .....	54
III.4 Jenis Penelitian .....	57
III.5 Informan .....	57
III.6 Jenis Data .....	58
III.7 Teknik Pengumpulan Data .....	58
III.8 Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
IV.1.1 Profil Kabupaten Bantaeng.....	61
IV.1.2 Letak dan Kondisi Geografis .....	62
IV.1.3 Visi, Misi Kabupaten Bantaeng.....	65
IV.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantaeng .....	67
IV.2.1 Struktur Organisasi DLH Bantaeng .....	67
IV.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantaeng .....	69
IV.3 Gambaran Umum Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng .....	69
IV.3.1 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng .....	70
IV.3.2 Uraian Tugas Pengelola Bank Sampah .....	71
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHSAN.....</b>	<b>73</b>
V.1 Implementasi Kebijakan Donald Van Metter Dan Carl Van Horn .....	73
V.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan .....	73
V.1.2 Sumber Daya.....	78
V.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana .....	81
V.1.4 Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana .....	85

V.1.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	91
V.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik .....	85
V.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi .....	91
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
VI.1 Kesimpulan .....	97
VI.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Bantaeng 2013-2018 .....	19
Tabel IV.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng .....	63
Table IV.2 Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 .....	64
Tabel V.1 Data Sampah Pengurangan Sampah Kabupaten Bantaeng tahun 2019-2020 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Tahapan Kebijakan Publik .....	27
Gambar II.2 Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi.....	31
Gambar II.3 Model Implementasi Kebijakan Van Metter & Van Horn .....	39
Gambar II.4 Model Implementasi Kebijakan George Edward III.....	44
Gambar II.5 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle .....	45
Gambar II.6 Model Implementasi Proses atau Alur Smith .....	46
Gambar II.7 Model Implementasi Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter .....	48
Gambar II.8 Kerangka Pikir .....	53
Gambar IV.1 Struktur Organisasi DLH Bantaeng.....	68
Gambar IV.2 Proses di Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng .....	70
Gambar IV.4 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Butta Toa .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah terdekat yang dihadapi sehari-hari. Jumlah timbunan sampah semakin hari makin membesar seiring bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan data pada web *internetworldstats.com* 10 Negara dengan penduduk terpadat di dunia, Indonesia termasuk dalam urutan ke empat setelah Amerika Serikat. Dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan jumlah timbunan sampah. Sampah yang semakin hari semakin meningkat akan sangat mengambil ruang yang banyak dan mengganggu aktivitas manusia jika tidak segera ditangani dengan baik.

Dilansir dari *news.detik.com* (diakses pada tanggal 22 Oktober, pukul 01.24) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menaksir timbunan sampah di Indonesia tahun ini sebesar 67,8 juta ton. Siti mengatakan, jumlah ini kemungkinan masih terus bertambah. Permasalahan tersebut tentu saja harus ditangani dengan baik. Beliau menyarankan untuk memiliki komitmen yang kuat untuk mengolah sampah sehingga penanganannya pun dapat optimal.

Laman *nationalgeographic.grid.id* memuat artikel tentang studi mengenai pengelolaan sampah di Pulau Jawa yang dilakukan Unilever Indonesia, bekerjasama dengan *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) dan *Indonesian Plastics Recyclers* (IPR), diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal dan merata. Dalam artikel tersebut menekankan pada sampah



yang tercampur antara satu jenis sampah dengan yang lainnya sehingga kesulitan untuk dipisahkan dan diolah.

Sistem pengelolaan yang kurang baik tentunya akan membawa dampak pada lingkungan mulai dari masalah kesehatan, Bahkan berpotensi mendatangkan bencana alam. Dilihat dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah pasal 5, yakni Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Begitupun, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Dalam pengelolaan sampah yang semakin banyak dan semakin beragam tentunya diperlukan sebuah solusi alternative. Alternative yang dimaksud bisa berbagai hal, seperti bermitra dengan badan usaha, mengupgrade operasional system tempat pembuangan akhir dengan teknologi yang lebih

canggih, ataupun melibatkan masyarakat dalam mengelola sampahnya. Pelibatan masyarakat dalam mengelolah sampah bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Selain dapat menumbuhkan kesadaran diri terhadap pentingnya menjaga lingkungan dengan mengelolah sampah, juga dapat mendorong masyarakat yang mandiri. Dalam jurnal Marlina Kurnia, dkk (2015) tentang evaluasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dengan cara mengelolah sampah dari rumah. Pola pikir masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Program Bank Sampah merupakan program kementerian lingkungan hidup lingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Unit pelayanan teknis (UPT) Bank Sampah mempunyai fungsi pengelolaan sampah yang masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu, pemerintah diharap bisa lebih berperan dalam mendorong kesadaran masyarakat dengan menguatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terkhususnya di lingkungan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng dikenal sebagai salah satu kota kecil terbersih yang berhasil menerima Piala Adipura sebanyak delapan kali sejak tahun 2010 dan berlanjut di tahun 2012 hingga berturut-turut di tahun 2013-2018. Penerimaan Piala Adipura yang ke delapan diterima pada masa awal kepemimpinan Bapak Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin bersama Wakilnya

Bapak Sahabuddin Periode 2018-2023. Prestasi tersebut tentu saja harus tetap dipertahankan. Kota yang bersih pun tidak akan pernah lepas dari permasalahan sampah. Tata kelola sampah yang baik sangat diperlukan tanpa lepas dari regulasi yang ada. Sebagaimana dijelaskan di awal paragraf tentang pengaruh kepadatan penduduk terhadap penambahan jumlah sampah dapat saling mempengaruhi. Berikut tabel laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng.

**Tabel I.1**

**Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Bantaeng 2013-2018**

<b>Kabupaten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>
<b>Bantaeng</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	181.006	182.283	183.386	184.517	185.581	186.612

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bantaeng 2018

Berdasarkan tabel di atas, Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018 terus mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah penduduk akan diikuti dengan meningkatnya jumlah konsumsi yang mengakibatkan peningkatan jumlah sampah. Sampah harus dikelola dengan tepat agar tidak menimbulkan berbagai penyakit.

Seperti pada Jurnal Penelitian Yulianto, dkk (2019) tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Manado yang menulliskan tentang kaitan pertambahan jumlah penduduk yang diiringi dengan pertambahan jumlah volume sampah sehingga mempengaruhi kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang sudah tidak mampu lagi menampung sampahnya.

Bersumber pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng tentang data sampah Kabupaten Bantaeng tahun 2020 per harinya ada 74,23 ton, dengan jumlah sampah terbanyak berasal dari sampah rumah tangga sebanyak 74 ton per harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingginya daya konsumsi juga tentunya akan diikuti dengan meningkatnya timbunan sampah, terutama pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Perbup Bantaeng nomor 63 tahun 2018).

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2018 mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Salah satu Program Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018–2025 yakni penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan program Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Pembentukan unit Bank Sampah di masyarakat dan Kawasan TPS3R.

Bank Sampah sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Defenisi Bank Sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Ada kurang lebih 30 unit Bank Sampah yang telah terbentuk di Kabupaten Bantaeng sejak periode Bupati Bantaeng Bapak Prof Nurdin Abdullah. Salah satu inovasi program Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng adalah Program Sampah Jadi Emas yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pegadaian (Persero) yang dijalankan oleh Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng. Bentuk kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dengan Pegadaian yaitu, Pegadaian menyediakan emas batangan yang siap ditukarkan dengan jumlah sampah yang terakumulasi dari nasabah Bank Sampah. Dilansir dari *Tagar.id* bahwa Program Sampah Jadi Emas sudah mulai dijalankan sejak tahun 2018. Namun, hingga tahun 2019 belum ada satupun nasabah yang menukarkan tabungan sampahnya dengan emas batangan. Sebagaimana juga yang dikatan Ibu Rukiyati selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng pada laman tersebut bahwa Program ini belum banyak diketahui masyarakat Bantaeng atau infomasi terkait program Bank Sampah tersebut belum merata. Permasalahan lainnya yang dikatakan Ibu Rukiyati adalah jumlah nasabah Bank Sampah di Bantaeng yang masih sedikit. Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng merupakan Bank Sampah yang berada di pusat Kota Bantaeng di Kelurahan Bontosunggu,, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan data Sampah Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng bahwa sekitar 11% sampah plastik yang berhasil di kumpulkan dan didaur ulang area perkotaan. Dari 11% sampah plastik yang dikumpulkan, hanya 0.26% yang berasal dari masyarakat sendiri yang mulai memilah sampah dari rumah untuk kemudian dikumpulkan dan diolah di Bank Sampah. Jadi, hanya sekitar 0,1929 ton/perharinya yang diolah oleh Bank Sampah.

Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng belum terlaksana dengan optimal. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk menyukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dibutuhkan peran masyarakat demi terselenggaranya program kebijakan dengan optimal.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yaitu :

- 1 Bagaimana implementasi program pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bantaeng?
- 2 Faktor-faktor yang menghambat implementasi program pengelolaan bank sampah Kabupaten Bantaeng?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program pengelolaan bank sampah Kabupaten Bantaeng.
- 2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat implementasi program pengelolaan bank sampah Kabupaten Bantaeng.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan para stakeholder yang melaksanakan implementasi pengelolaan sampah.

##### **b. Akademis**

Penelitian diharapkan memberi sumbangan intelektual ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan sebagai bahan referensi bagi siapa pun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Kebijakan Publik**

##### **II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Carl Friedrich (Luankali, 2007) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Ada beberapa poin yang dapat ditangkap dari pendapat Friedrich, yakni pengusulan kegiatan dari pemerintah merupakan solusi dalam mengatasi suatu kendala yang dihadapi agar tujuan dapat tercapai.

Pendapat lain dikatakan oleh Dye bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.”(Tahir, 2015:7) Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa melalui kebijakan publik dapat diketahui arah atau apa yang akan dikerjakannya. Menurut Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Publik Policy* (1971) mendefenisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Dalam pandangan Eyestone menjelaskan kebijakan publik masih terlalu luas sehingga sulit bagi para ahli untuk mempelajarinya (Nugroho, 2003:6).

Pendapat lain dari James Anderson dalam Agustino (2006:7) mendefenisikan kebijakan publik dalam bukunya *Publik Policy Making* “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti



dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau dengan suatu hal yang diperhatikan.”

Dari beberapa defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang secara sengaja disusun oleh pemerintah dan badan lainnya yang saling terkait sebagai solusi dari suatu permasalahan guna mencapai tujuan tertentu.

### **II.1.2 Tahapan Kebijakan Publik**

Untuk dikatakan sebagai sebuah kebijakan tentu harus melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Menurut William Dunn dalam Subarsono (2005:8) tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

#### **1. Penyusunan Agenda**

Pada tahap ini membantu para analis kebijakan untuk mengenali suatu masalah publik sebagai prioritas dalam menyusun agenda kebijakan. Menurut Dunn (Dunn, 2000) bahwa untuk merumuskan suatu masalah harus dilakukan beberapa fase, yakni *problem search* (pencarian masalah), *problem definition* (pendefinisian masalah), *problem specification* (spesifikasi masalah), *problem sensing* (pengenalan masalah). Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai agenda kebijakan, suatu masalah publik harus melewati pertarungan oleh para perumus kebijakan hingga dapat diangkat sebagai agenda kebijakan.

#### **2. Formulasi Kebijakan**

Setelah melakukan analisis masalah dan pertarungan agenda kebijakan hingga telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan formulasi kebijakan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan akan

membahas solusi dari permasalahan yang diangkat. Solusi tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya penyusunan agenda kebijakan, tiap-tiap alternatif harus melewati pertarungan untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang dapat memecahkan masalah.

### 3. Adopsi Kebijakan

Alternatif-alternatif yang dipilih oleh perumus kebijakan akan melewati tahap adopsi kebijakan. Pada tahap ini, hanya ada satu alternatif yang akan terpilih dan kemudian diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif.

### 4. Implementasi Kebijakan

Menurut Dunn (2000), implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil, yang dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

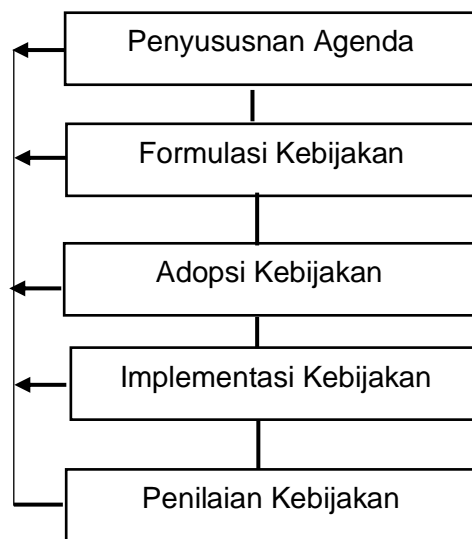
Dapat dipahami bahwa pada tahap ini kebijakan mulai diimplementasikan oleh pemerintah sampai pada tingkat bawah agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.

### 5. Penilaian Kebijakan

Menurut Budi Winarno dalam Sahya Anggara (2014:121) penilaian kebijakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Pada tahap ini, indikator evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik dan mengatasi masalah publik. Dari hasil evaluasi akan menjadi bahan

pertimbangan untuk perumus kebijakan sebagai umpan balik (*feedback*) dengan harapan dapat memperbaiki ataupun terjadi peningkatan dalam sebuah kebijakan.

Gambar 2.1  
Tahapan Kebijakan Publik



Sumber : Subarsono, 2005:9.

## II.2 Implementasi Kebijakan Publik

### II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan objek dari implementasi. Kebijakan harus dibuat terlebih dahulu untuk kemudian diimplementasikan. Dalam Suratman (2017:55) mendefinisikan Implementasi sebagai pelaksanaan suatu keputusan kebijakan.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible out*). Istilah implementasi mencakup

tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2006:139), Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Lester dan Stewart Jr mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian dari tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Hill & Hupe, 2009).

Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (2010) dalam Sahya Anggara (2014:232) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan itu harus melihat dampak dari suatu kebijakan pada masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier dalam Suratman (2017: 56) menjelaskan makna implementasi adalah “upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Tachjan dalam Alamsyah (2016:67) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Defenisi para ahli di atas menggambarkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang mengarah pada sasaran tertentu atau suatu permasalahan yang berorientasi pada hasil (*output*).

## **II.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi**

Menurut Abidin dalam Mulyadi (2016: 60-61) memandang bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara itu, faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Kondisi kebijakan adalah faktor internal yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan justru kebijakan itu sendiri, tanpa adanya kebijakan maka tidak ada yang diimplementasikan. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal, yaitu kualitas kebijakan dan strategi implementasi. Kebijakan yang tidak berkualitas, tidak bermanfaat untuk diimplementasikan. Strategi implementasi yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh

dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu banyak kegagalan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi juga karena strategi implementasinya. (Winarno, 2007)

Faktor utama internal kedua dalam proses implementasi adalah sumberdaya yang merupakan faktor pendukung terhadap kebijakan. Faktor pendukung ini dalam pengertian ekonomi bisnis biasa disebut sebagai input (Nugroho, 2003). Namun dalam beberapa hal ada perbedaan antara inputs dalam pengertian bisnis dengan faktor pendukung dalam pengertian manajemen atau kebijakan publik ini. Input dalam pengertian ekonomi mikro meliputi apa yang disebut 6M (*Men, Money, Material, Method, Machine, dan Market*). Sementara itu, faktor pendukung dalam kebijakan publik meliputi sumberdaya manusia, keuangan, logistic, informasi, legitimasi dan partisipasi. (Wahab, 2012)

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, menurut Mulyadi (2016: 62) beberapa faktor yang mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut :

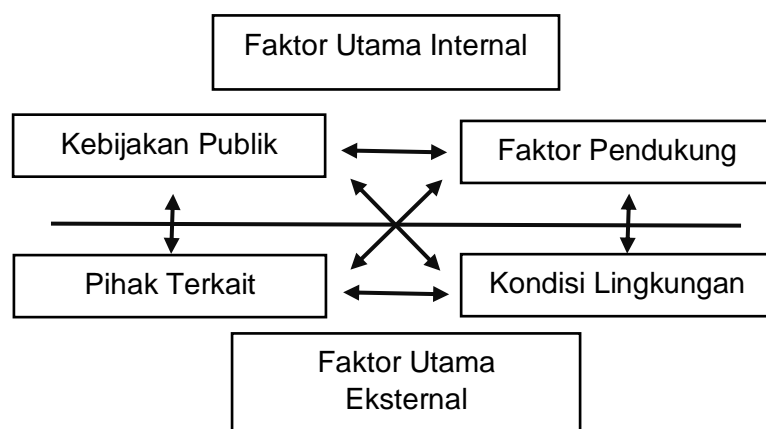
- a. Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim, atau bencana alam. Dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi risiko yang terjadi.
- b. Faktor politik. Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pergantian pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam

implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.

- c. Tabiat. (*Attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijakan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan sebelum itu dilaksanakan.
- d. Terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup.
- e. Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah implementasi. Kelemahan pada kebijakan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan itu tidak tepat.

Gambar 2.2

Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi



Sumber : Mulyadi, 2016.

Menurut Bambang Sunggono dalam Tahir (2015:51), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.



d) Pembagian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012: 128-129) telah membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori besar, yaitu :

- *Non-implementation* (tidak terimplementasikan)
- *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal tiba-tiba

terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam. Dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya, kebijakan yang memiliki risiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor berikut: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*). (Winarno, 2007)

### **II.2.3 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan**

Smith dalam Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah :

#### 1) Unsur pelaksana (implementor)

Smith menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, yang artinya adalah birokrasi pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ripley & Grace A. Franklin dalam Tachjan (2006:27) bahwa: “*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant*”. Maksudnya, birokrasi memiliki peran yang dominan dalam pelaksanaan program dan kebijakan, serta setiap tahapan kebijakan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Dalam tahap perumusan, legitimasi kebijakan dan program, unit birokrasi memiliki peran yang besar, meskipun tidak dominan. Pelaksana kebijakan

mempunyai wewenang dalam perencanaan, penyusunan program, strategi organisasi, pengorganisasian, mengatur sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian, dan pengambilan keputusan.

2) Adanya program yang akan dilaksanakan

Implementasi kebijakan kemudian dijabarkan secara mendetail dalam bentuk program-program. Hakikat daripada implementasi kebijakan adalah implementasi program. Sebagaimana menurut Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa : *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”* yang artinya “Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk membuat program menjadi efektif”.

3) Target grup

Target grup (kelompok sasaran) merupakan sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menjadi sasaran dengan harapan dapat memperoleh manfaat dari program yang telah dibuat.

#### **II.2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam studi implementasi kebijakan publik, ada dua pendekatan yang digunakan yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*.

A. Model Implementasi Perspektif *Top-Down*

Pendekatan *top-down* merupakan keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang diambil oleh tingkat pusat yang kemudian dilaksanakan oleh birokrat

level bawahnya. Berikut beberapa model implementasi dengan perspektif *top down* :

1. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model yang dirumuskan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2006:141) disebut dengan model *A Model Of The Policy Implementation*. Ada enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.

Standar dan tujuan kebijakan memiliki keterkaitan dengan pelaksana. Pelaksana harus memahami arah suatu kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan

implementasi kebijakan. Ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan yang dapat menghambat tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan anggaran yang berjalan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan. (Mulyadi. 2015:72)

### 3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi diperlukan agar tidak terjadi salah pemahaman baik antarorganisasi maupun pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan dapat menangkap apa yang menjadi harapan dari standar dan tujuan kebijakan dan apa yang harus dilakukan. Koordinasi sangat diperlukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.

### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

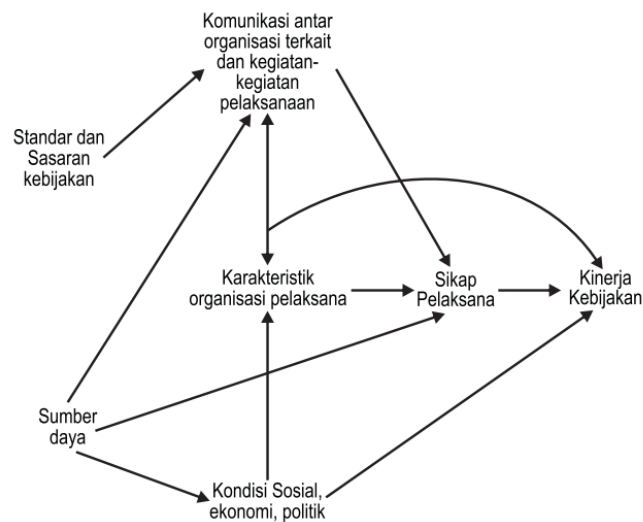
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

6. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:143) ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik yang bersifat *top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Gambar 2.3

Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn



Sumber : Tachjan, 2006:40

## 2. Model George Edward III

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :

### 1. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:150); "komunikasi merupakan salah-satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan

hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga variable yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:150-151) mengemukakan tiga variable tersebut yaitu:

- a. *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertiduri di tengah jalan.
- b. *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c. *Konsistensi*, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumberdaya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:151-152), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:



- a. *Staf*, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. *Informasi*, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi

kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- d. *Fasilitas*, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:152): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:152-153) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. *Pengangkatan birokrasi*; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. *Insentif*; Edward menyatakan bahwa salah-satu yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

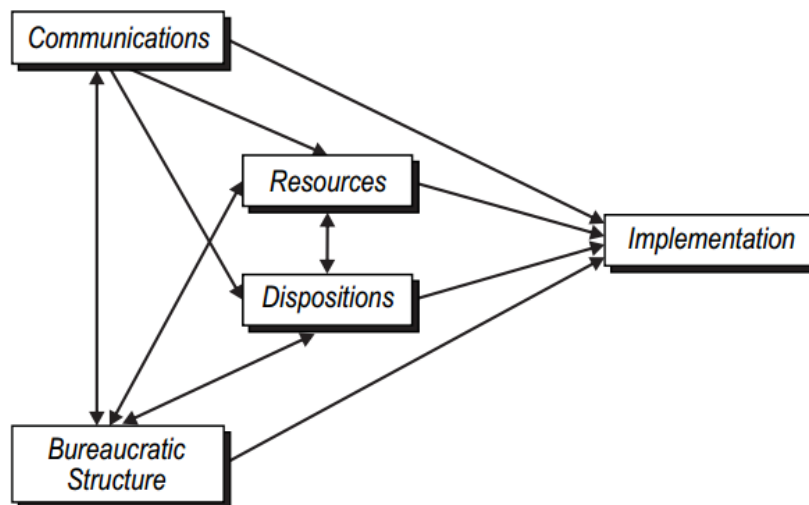
#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III, ada dua karakteristik yang dapat mendorong struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, adalah : *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan

fregmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Gambar 2.4

Model Implementasi Kebijakan George Edward III



Sumber : Tachjan, 2006:57

### 3. Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1). Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

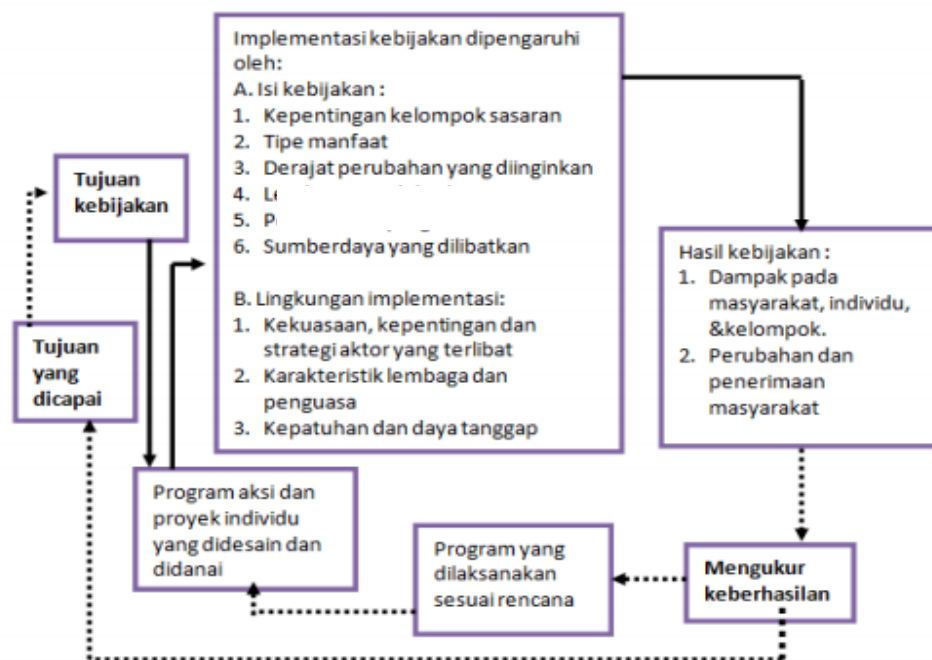
4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Gambar 2.5

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber : Subarsono, 2005:94

## B. Model Implementasi Perspektif *Bottom-Up*

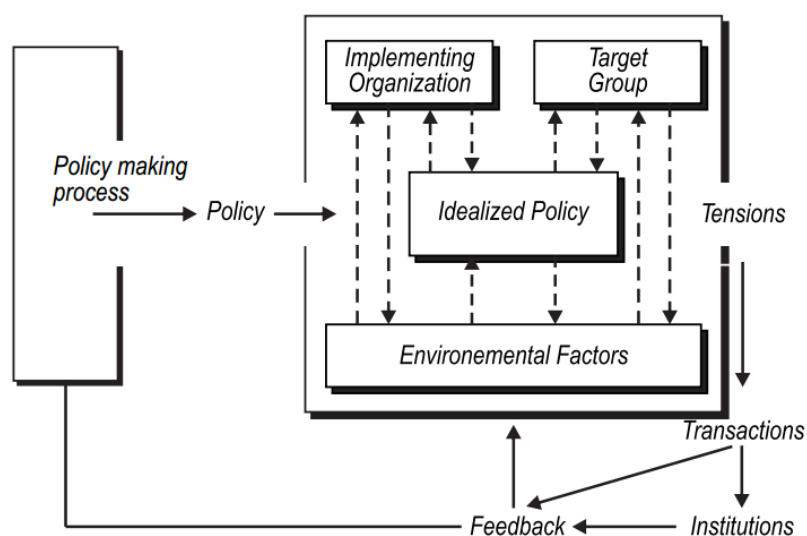
### 1. Model Proses atau Alur Smith

Menurut Smith dalam Tachjan (2006:37) bahwa ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi, yaitu :

- a. Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan;
- b. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan;
- c. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan;
- d. *Environmental factor*, yakni unsur unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Gambar 2.6

Model Implementasi Proses atau Alur Smith



Sumber : Tachjan, 2006:39

## 2. Model Implementasi Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter

Tahir (2015: 92) menjelaskan model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi kebijakan ini didasari kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Secara garis besar model implementasi Elmore, dkk dapat dilihat dalam tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat.
- 2) Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah level bawah.
- 3) Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi sasaran.
- 4) Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.

Model ini juga mengedepankan dua variabel utama, yaitu:

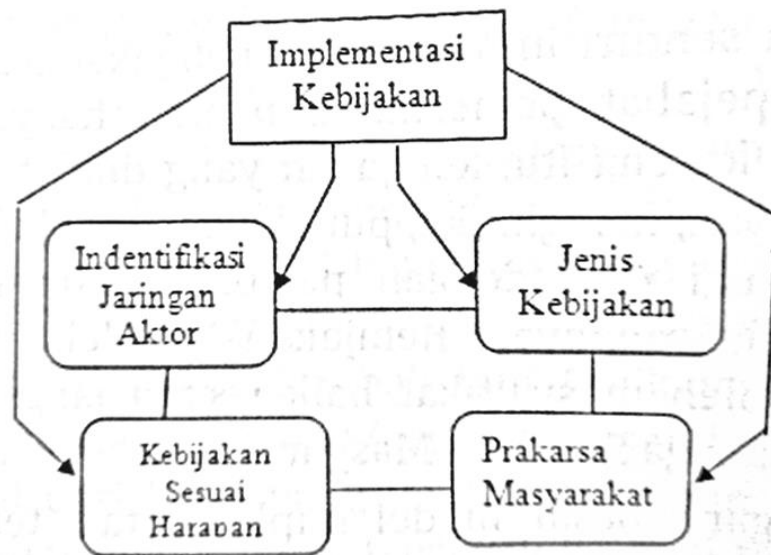
- a. Isi kebijakan dan konteks implementasinya, dimana isi kebijakan meliputi : kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber data yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya meliputi : kekuasaan atau strategi aktor

yang terlibat, karakteristik lembaga atau penguasa, dan kepatuhan dan daya tanggap.

- b. Dampak dari kebijakan itu sendiri meliputi : manfaat dan program, perubahan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat.

Gambar 2.7

Model Implementasi Elmore, Lipsky, Hjem & David O'Porter



Sumber : Tahir, 2015

## II.3 Pengelolaan Sampah melalui Pelibatan Masyarakat

### II.3.1 Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Bupati Bantaeng No. 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa :



(1) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(2) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Peraturan Bupati Bantaeng No. 63 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bahwa Salah satu program yang disusun berdasarkan turunan dari strategi penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi adalah Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:

- a. Pembentukan Bank Sampah di masyarakat; dan
- b. Kawasan (TPS3R)

### **II.3.2 Konsep Pelibatan Masyarakat**

Pelibatan Masyarakat dapat pula diartikan sebagai partisipasi. Sebagaimana menurut KBBI keterlibatan merupakan keikutsertaan, kesertaan, kontribusi, partisipasi, peran serta, implikasi, keterkaitan, sangkutan.

Santosa dalam Sulistiyorini berpendapat (2015:74) bahwa: “Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”

Begitu pula menurut Sastropetro dalam Sulistiyorini (2015:74) bahwa “Keterlibatan Spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan”.

Ada beberapa peran masyarakat dalam berpartisipasi mengelola sampah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 28, yaitu :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
  - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah
  - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Tidak semua partisipasi ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan. Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith dalam Sulistiyorini (2015:74) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam program, inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program.

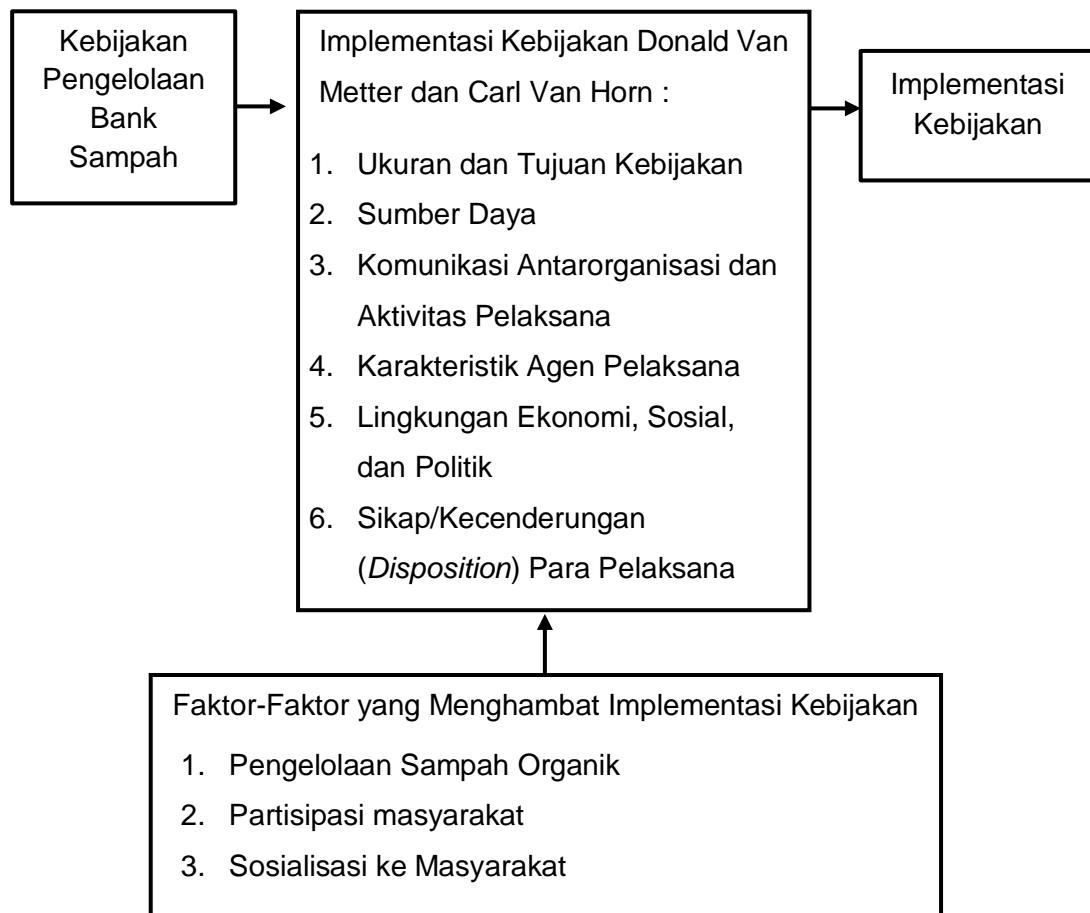
Menurut Sastropetro dalam Jurnal Sulistiyorini (2015:74) menjabarkan jenis partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program, maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- 2) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

- 3) Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui ketrampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- 4) Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.
- 5) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan,

#### II.4 Kerangka Pikir

Gambar 2.8  
Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. (Jamaluddin, 2015:52) Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Pelibatan Masyarakat Kabupaten Bantaeng.

#### **III.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Induk Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada data yang telah diperoleh oleh penulis bahwa jumlah kepadatan penduduk terbesar ada pada Kecamatan Bantaeng yang juga sebagai pusat kota Kabupaten Bantaeng.

#### **III.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penelitian ini, maka

penulis akan memberikan penjelasan mengenai fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengukur keberhasilan Implementasi Pengelolaan Sampah Melalui Pelibatan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng, maka penulis menggunakan Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Winarno (2007:158) yang mengemukakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan.

2. Sumber Daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material (*material resources*). (Nawawi,2007:140)

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, yakni kompetensi dan ukuran staf agen, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

#### 5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

#### 6. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Terdapat tiga macam elemen respon yang



dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, antara lain : pertama yaitu pengetahuan atau pemahaman terhadap kebijakan, kedua yakni arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.

#### **III.4 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, maupun dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pelibatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

#### **III.5 Informan**

Untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan informan yang mempunyai pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Informan tersebut diharapkan mampu untuk menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang diinginkan pada penelitian.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu :

1. Satu Informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Satu Informan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

3. Tiga Informan Pengelola Bank Sampah (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)
4. Dua Informan Tokoh Masyarakat
5. Empat Informan Masyarakat

### **III.6 Jenis Data**

Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan dari penelitian kualitatif, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dapat diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen, peraturan, laporan-laporan serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

### **III.7 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan:85)

2. Observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati objek secara langsung atau lebih dekat guna memahami objek untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Cartwright & Cartwright dalam Suharsaputra (2012:211) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

### 3. Dokumentasi

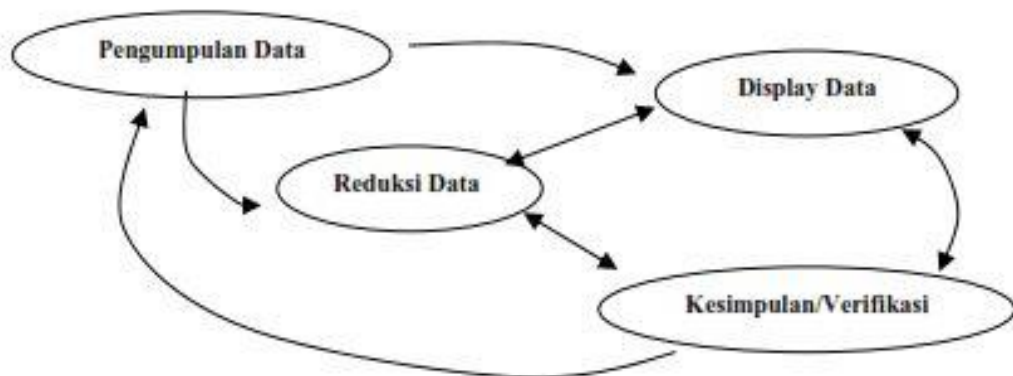
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya.(Jamaluddin, 2015:171)

## **III.8 Teknik Analisis Data**

Data yang telah didapatkan oleh peneliti kemudian di analisis secara sistematis. Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2007:92), mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data, yaitu :

Gambar III.1

Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman  
(1984)



Sumber : Sugiyono, 2007:92

**Data reduction atau Reduksi Data** artinya merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

**Data display atau Penyajian Data** dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

**Conclusion drawing/verification** artinya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **IV.1.1 Profil Kabupaten Bantaeng**

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten/kota yang berada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng awalnya bernama "Bantayan" yang kemudian di ganti dengan nama "Bhontain" dan terakhir berganti nama menjadi "Bantaeng" berdasarkan Keputusan DPRD-GR Kabupaten Bantaeng Nomor 1/Kpts/DPRDGR/I/1962 tanggal 22 Januari 1962. Bantayang memiliki makna yakni tempat pembataian hewan dan sapi/kerbau dimasa lalu untuk menyambut dan manjamu utusan Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperluas wilayahnya ke bagian timur Nusantara sekitar abad ke XII dan XIII. Bantaeng juga dikenal dengan julukan "Butta Toa", oleh sebab itu Bantaeng memiliki latar belakang sejarah yang sudah diketahui dimana telah terbentuk sejak tanggal 7 Desember 1254 sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Bantaeng (KKB) yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 1999, dimana sesuai pertimbangan, saran dan alasan para nara sumber, pakar dan ahli sejarah serta tokoh pemuka masyarakat yang berasal dari Bantaeng maupun tokoh yang masih mempunyai keterkaitan moral dengan Bantaeng. Juga berdasarkan penelusuran sejarah dan budaya, baik pada awal masa pemerintahan Kerajaan masa pemerintahan Hindia Belanda, masa

pemerintahan awal kemerdekaan hingga terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 sampai sekarang.

#### **IV.1.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak  $\pm$  120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi  $5^{\circ}21'13''$   $5^{\circ}35'26''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}51'42''$  -  $120^{\circ}05'27''$  Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi Laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan, 21 kelurahan dan 46 desa. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa, Bulukumba, dan Sinjai
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Luas Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi wilayah daratan mencapai 395.83 km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan mencapai 144 km<sup>2</sup> dalam 9 Kecamatan di Kabupaten Bantaeng berdasarkan tabel berikut :

**Tabel IV.1**

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng**

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas Daratan (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Luas Wilayah (%)</b>
Bantaeng	Pallantikang	28,85	7,29
Bissappu	Bonto Lebang	32,84	8,30
Uluere	Bonto Marannu	67,29	17,00
Sinoa	Bonto Maccini	43,00	10,86
Eremerasa	Ulugalung	45,01	11,37
Tompobul	Banyorang	76,99	19,45
Pajukukang	Nipa-nipa	48,90	12,35
Gantarangkeke	Gantarangkeke	52,95	13,38
<b>Total</b>		<b>395,83</b>	<b>100,00</b>

*Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018*

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 wilayah kecamatan dengan 21 kelurahan dan 46 desa. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 sebanyak 185.581 jiwa yang terdiri dari laki-laki 89.494 jiwa dan perempuan 96.087 jiwa dengan rincian jumlah penduduk, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table IV.2**

**Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut  
Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Area</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Distribusi Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk</b>
1	Bissappu	32,84	32.665	17,50	995
2	Uluere	67,29	11.419	6,12	170
3	Sinoa	43,00	12.491	6,69	291
4	Bantaeng	28,85	38.776	20,78	1.345
5	Eremerasa	45,01	19.660	10,54	437
6	Tompobulu	76,99	24.201	12,97	315
7	Pajukukang	48,90	30.643	16,42	627
8	Gantarangekeke	52,95	16.757	8,98	317
<b>Kabupaten Bantaeng</b>		<b>395,83</b>	<b>186.612</b>	<b>100</b>	<b>472</b>

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020*

Berada di kaki Gunung Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Wilayah daerah pesisir 59,33 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,99% dengan sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km<sup>2</sup> atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan



kemiringan lebih dari 40 meter.

Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yaitu bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Dengan dua musim dan perubahan iklim setiap tahunnya yang dikenal di daerah ini dengan nama musim barat antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim timur antara bulan April sampai bulan September. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Bantaeng berada pada range cukup rendah dengan besaran 18,00C- 21,40C. Udara di Kabupaten Bantaeng juga cukup lembab dengan rata-rata kelembaban udara mencapai 78,4 pada bulan November. Sedangkan tekanan udara berada pada kisaran 875,6 mb - 884,1 mb, dengan kecepatan angin berada pada kisaran 2 knot - 4 knot. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah. Curah hujan di Kabupaten Bantaeng hampir merata disetiap bulan dalam setahun kecuali bulan Agustus yang hanya memiliki curah hujan 10 mm<sup>3</sup>. Jumlah hari hujan mencapai rata-rata 13-14 hari per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 166 hari dalam setahun. Musim hujan dengan angin barat jatuh pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim hujan dengan angin timur jatuh pada bulan April sampai September. Kedua musim tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian.

#### **IV.1.3 Visi & Misi Kabupaten Bantaeng**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa

depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bantaeng, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2018– 2023 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Bantaeng yang Sejahtera Lahir Batin Berorientasi Pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian, dan Keunggulan Berbasis Agama Dan Budaya”**. Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni “Sejahtera Lahir Batin”, “Berorientasi pada Kemajuan, Keadilan dan Kelestarian”, dan “Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal”.

Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sejahtera Lahir Batin adalah kondisi dimana sektor-sektor perekonomian memiliki produksi dan produktivitas masyarakat berkeunggulan dan berdaya saing yang tinggi dalam menghadapi dinamika perubahan sehingga dapat mendorong perbaikan pendapatan dan kemampuan masyarakat untuk peningkatan taraf hidupnya. Berorientasi pada Kemajuan, Keadilan dan Kelestarian masing-masing dijabarkan secara terpisah. Orientasi pada Kemajuan, yakni peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat dan kesehatan yang dibingkai oleh pelayanan publik yang optimal. Orientasi pada Keadilan yakni menjunjung tinggi kesetaraan bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, mengayomi seluruh lapisan masyarakat agar memiliki posisi dan jarak yang sama dalam

mengakses sumber- sumber ekonomi dan mendorong kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Menjunjung tinggi orientasi kelestarian dimaksudkan untuk mengelola sumberdaya alam secara lebih baik dengan memaksimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat namun tetap berpegah teguh pada pelestarian lingkungan.

Adapun Keunggulan berbasis Agama dan Budaya Lokal adalah kondisi dimana keunggulan yang dimiliki adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia, sumber daya kebudayaan dan sumber daya alam secara lebih baik dan melipat gandakan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat yang dibangun atas kesadaran yang berlandaskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal budaya Masyarakat Butta Toa Bantaeng.

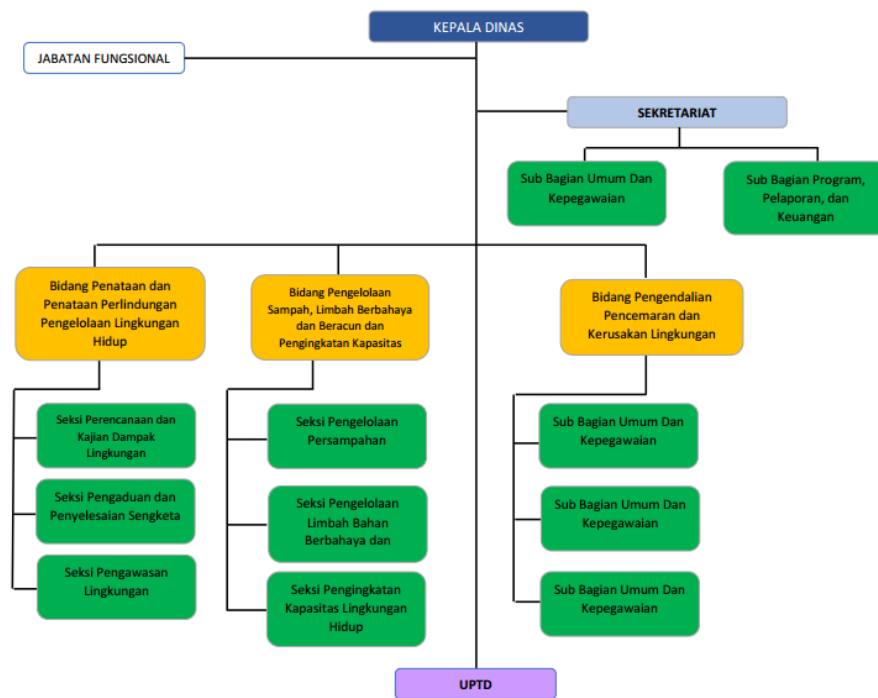
## **IV.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantaeng**

### **IV.2.1 Struktur Organisasi DLH Bantaeng**

Adapun bagian struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
  3. Seksi Pengawasan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Limbah dan Peningkatan Kapasitas:
1. Seksi Pengelolaan Persampahan
  2. Seksi Pengelolaan Limbah B3
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan:
1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
  2. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  3. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas



**Gambar IV.1 Struktur Organisasi DLH Bantaeng**

#### **IV.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantaeng**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup serta Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **IV.3 Gambaran Umum Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng**

Program Bank Sampah merupakan program kementerian lingkungan hidup lingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Unit pelayanan teknis (UPT) Bank Sampah mempunyai fungsi pengelolaan sampah yang masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui dinas Lingkungan Hidup telah membentuk 32 unit Bank Sampah yang tersebar di 8 kecamatan dan 1 Bank Sampah induk. Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng merupakan Bank Sampah utama yang berada di pusat kota Kabupaten Bantaeng. Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng mengolah sampah non-organik dan organik yang terkumpul dari masyarakat yang kemudian di daur ulang ataupun dijual

kembali. Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng terletak di Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Bank Sampah Induk Butta Toa merupakan Bank Sampah pusat yang ada di Kabupaten Bantaeng dan bertanggungjawab menjalankan program nasional yakni Sampah Jadi Emas. Bank Sampah Butta Toa didirikan pada tahun 2016 sampai saat ini dan jumlah nasabah di Bank Sampah induk butta toa bantaeng ada 28 nasabah.

Adapun proses pengelolaan Bank Sampah induk butta toa bantaeng sebagai berikut :

#### **Gambar IV.3 Proses di Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng**



*Sumber: Wawancara dengan pengelola Bank Sampah pada tanggal 09 Februari 2021*

#### **IV.3.1 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng**

Adapun bagian struktur organisasi Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng dapat dilihat dibawah ini :

Susunan pengurus atau pengelola Bank Sampah unit yaitu sebagai berikut :

- a) Pembina
- b) Ketua
- c) Sekretaris
- d) Bendahara
- e) Seksi Penjemputan

- f) Seksi Penimbangan
- g) Seksi Daur Ulang
- h) Seksi Pengomposan

#### **IV.3.2 Uraian Tugas Pengelola Bank Sampah**

##### **a. Tugas Sekretaris**

- Membuat laporan produksi, penjualan dan perkembangan Bank Sampah;
- Membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
- Membuat pembukuan daftar Bendahara;
- Melakukan pengecekan terhadap sampah yang disetor oleh nasabah; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

##### **b. Tugas Bendahara**

- Melakukan pembelian dan penjualan hasil daur ulang sampah di Bank Sampah;
- Membuat laporan harga pasaran lokal hasil olahan sampah;
- Membuat laporan pembelian dan penjualan hasil olahan daur ulang sampah di Bank Sampah; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

##### **c. Tugas Seksi Penjemputan**

- Menjemput sampah dari nasabah maupun dari Bank Sampah unit
- Memberi laporan kepada seksi penimbangan untuk kemudian sampah ditindaklanjuti.

**d. Tugas Seksi Penimbangan**

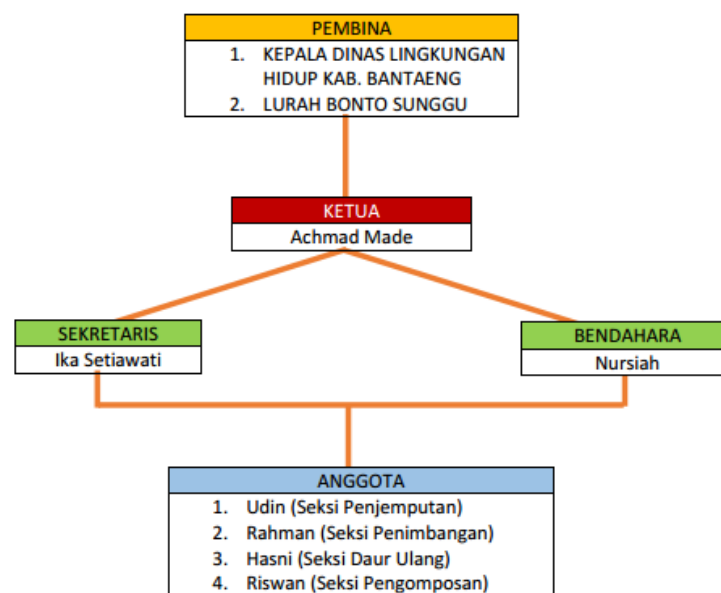
- Mengumpulkan dan memilah semua sampah dari nasabah;
- Menimbang sampah dari setiap nasabah; dan
- Memberi laporan kepada pencatat hasil dari timbangan sampah dari setiap nasabah.

**e. Tugas Seksi Daur Ulang**

- Melakukan pengolahan daur ulang sampah yang disetor oleh setiap nasabah;
- Mengemas sampah sesuai dengan jenis sampahnya;
- Bertanggungjawab dalam meminilisir penumpukan sampah yang berhamburan di Bank Sampah; dan

**f. Tugas Seksi Pengomposan**

- Memilah sampah organik dan melakukan pengolahan limbah sampah
- Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan.



**Gambar IV.4 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng**



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan pelaksanaan program Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bantaeng dan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2006) dan faktor yang mempengaruhi proses implementasi menurut Abidin dalam Mulyadi (2016).

Secara terperinci, peneliti akan menjabarkan hasil wawancara dari narasumber terkait dengan pengelolaan sampah melalui pelibatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian :

#### **V.1 Implementasi Kebijakan Donald Van Metter Dan Carl Van Horn**

##### **V.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan tujuan kebijakan memiliki keterkaitan dengan pelaksana. Pelaksana harus memahami arah suatu kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa :

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak N selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa :

*“Kalau kita ingin melihat tujuan dari penanganan sampah kan sudah ada dalam aturan itu,. tentu saja untuk mengurangi sampah. Sampah setiap hari semakin banyak, jadi kalau tidak ditangani pasti akan banyak dampaknya ke lingkungan bahkan ke kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup juga berupaya mengurangi sampah ke TPA salah satunya melakukan pemanfaatan sampah kembali, mengangkut sampah, bahkan sekarang di Bantaeng sudah ada Bank Sampah. Selain mengurangi sampah yah itu juga membantu masyarakat dalam perekonomiannya.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Bapak M selaku Ketua Operasional Bank Sampah Induk Butta Toa juga mengatakan hal serupa bahwa :

*“Iye, kita juga disini selalu komunikasi sama orang dari dinas, biasa kita diikutkan pelatihan atau datang langsung kesini. Diawal juga sudah pernah adami pembicaraan kalau mau ada program Bank Sampah di Kecamatan Bantaeng sampai saya dipercaya dari dinas untuk kasi jalanki. Yah alhamdulillah, sejaknya ada ini Bank Sampah masyarakat disini jadi punya kerjaan juga, sampah juga jadi berkurang, sampah yang tadi dibuang saja kalau dibawa kesini jadi ada harganya, jadi banyaklah manfaatnya.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa para Stakeholder baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Operasional Bank Sampah memahami tujuan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini tujuan dari dibentuknya Bank Sampah, yakni agar dapat mengurangi sampah baik dengan upaya pemanfaatan kembali ataupun dengan melakukan daur ulang sampah dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Maka, dapat disimpullkan bahwa stakeholder dapat memahami peran dan tugas masing-masing melalui arah kebijakan yang ada sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa :

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun tujuan dari dibentuknya Bank Sampah adalah sebagai salah satu syarat dalam penerimaan penghargaan adipura. Sebagaimana dikatakan Ibu R sebagai berikut

*“Selain sebagai pemberdayaan masyarakat, Bank Sampah juga sebagai salah satu syaratnya untuk dapat piala adipura dan itu sudah diterapkan sejak masa jabatan Prof Nurdin Abdullah dan berhasil terima piala adipura delapan kali”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian Piala Adipura tak lepas dari peran Bank Sampah dalam mendorong pencapaian tersebut. Keberhasilan yang dicapai tentu tak lepas dari peran pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Termasuk dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Dalam menjalankan program tentunya memiliki landasan atau disebut indikator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

Indikator di atas dapat mengukur output dari program pengelolaan sampah yang salah satunya adalah Bank Sampah sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut. Berhasil tidaknya suatu program dapat diukur dari data yang

ditunjukkan. Data sampah yang diambil yakni pengurangan (Pembatasan, Pemanfaatan, Daur Ulang) Kabupaten Bantaeng tahun 2019-2020 sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

**Table V.1**

**Data Sampah Pengurangan Sampah Kabupaten Bantaeng tahun 2019-2020**

<b>Jumlah Total sampah (ton/hr)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	90,5953	95,788

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 2020

Peningkatan jumlah total sampah di atas memberikan simpulan bahwa pengupayaan pencapaian tujuan belum berjalan maksimal. Dikatakan maksimal apabila terjadi penurunan jumlah sampah dari tahun sebelumnya dengan signifikan.

Pencapaian tujuan secara konseptual sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng tahun 2018 dan juga sudah mulai dijalankan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng yang salah satunya adalah Program Bank Sampah Induk Butta Toa. Ibu R, mengatakan :

*“Bank Sampah inikan seperti yang saya katakan tadi kalau ini merupakan salah satu syarat penerimaan piala adipura dan memang sudah ada aturannya. Kalau untuk Bank Sampah Induk itu memang sudah lama sejaknya Bupati Nurdin Abdullah menjabat.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakannya sudah dilaksanakan, namun untuk menilai sejauh mana implementasi suatu kebijakan tercapai harus melihat faktor lainnya yang akan

dibahas di indikator selanjutnya. Pemahaman terkait ukuran dan tujuan sebuah kebijakan pada lingkup pelaksana program Bank Sampah induk kabupaten bantaeng dan stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bnataeng seperti pada wawancara dan observasi penulis menunjukkan bahwa sudah memahami dengan baik, namun tidak linear dengan hasil data sampah di lapangan yang tidak menurun secara signifikan.

### **V.1.2 Sumber Daya**

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan yang dapat menghambat tujuan kebijakan publik. Persoalan tersebut dijawab oleh Bapak Made selaku Ketua Bank Sampah Induk Butta Toa Banateng.

Bapak M mengatakan,

*“Alhamdulillah kalau soal dana tidak pernah ji kekurangan. Selain kita kelola sendiri juga, ada juga dana dari dinas yang kasiki jadi tidak pernah ji kekurangan kalau masalah uang.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Bapak M menambahkan terkait sumber dayanya bahwa :

*“Kalau tenaga juga tidak pernah ji dibilang kurang karena masing-masing kan sudah adami tugasnya sudahmi diatur sejak awal. Ada bagian jemput sampah, timbang sampah, sampai dijual juga sudah adami yang bertugas untuk itu semua.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketersediaan sumber daya tentu saja mendukung berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Pengurus Bank Sampah induk butta toa dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing dan mereka saling membantu satu sama lain apabila terjadi kesulitan dalam menjalankan tugas. Dari hasil wawancara dan kajian data penulis menunjukkan bahwa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sudah terpenuhi dengan baik. Pengelolaan sumber daya sudah dilakukan dengan baik dengan adanya pembagian tugas yang jelas. Dilihat dari struktur Bank Sampah induk butta toa bantaeng yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Penjemputan, Seksi Penimbangan, Seksi Daur Ulang, dan Seksi Pengomposan. Selama ini anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program Bank Sampah di Bank Sampah induk buta toa bantaeng berasal dari dana APBD Kabupaten Bantaeng, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu R selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya, dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas :

*“Sumber dana untuk operasional Bank Sampah itu sudah di anggarkan di APBD. Ada beberapa bantuan yang sudah diterima Bank Sampah induk itu, seperti satu unit truk sampah, satu unit motor pengangkut sampah, satu buah papan nama Bank Sampah, satu unit lemari, satu unit rak data, satu unit timbangan meja digital, satu unit timbangan gantung, satu unit printer, satu notebook, 50 buah buku rekening tabungan, sama 50 buah slip setoran tabungan.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Sarana dan Prasarana tentu juga sangat mendukung berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan. Sarana dan prasarana merupakan alat untuk menjalankan program agar terlihat output dari suatu kebijakan. Sebagaimana Bapak M katakan:

*“Kita disini ada beberapa kegiatan, selain menerima sampah yang bisa diolah kita juga ada pengomposan. Dulu belum ada tempat pengomposan seperti sekarang dulu cuma pake drum plastic itupun sedikit ji, tapi Alhamdulillah karena dana dari dinas jadi kita bisa bangun dibelakang sini tempat pengomposan. Cuma itu lagi karena pengomposan pemilahnannya itu agak lama kerjanya jadi kami biasa tidak terlalu fokus ke pengomposan. Truk yang biasa juga dipakai untuk angkut sampah rusak jadi terkendala disitu lagi. Paling ke daur ulang sampah baru dikirim keluar untuk dijual atau dijadikan kerajinan tangan.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa saat ini sarana dan prasarana yang ada di Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng dalam menunjang keberhasilan implementasi pengelolaan sampah dinilai cukup baik. Terlihat dari satu unit motor pengangkut sampah dan timbangan. Namun, yang menjadi kendala adalah belum maksimalnya pengelolaan sampah yang ada di masyarakat terkhusus dalam sampah organik. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

Infroman I, mengatakan :

*“kalau untuk daun-daun depan rumah itu tidak dibawa ke Bank Sampahji, dibakar ji biasa dekat rumah.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengelolaan sampah organik di masyarakat yang mana sampah organik juga masuk dalam kategori pemanfaatan sampah organik menjadi kompos di Bank Sampah induk butta toa bantaeng.

Meskipun secara finansial dan kuantitas sumber daya sudah terpenuhi sesuai kebutuhannya di Bank Sampah induk butta toa bantaeng, melihat jumlah nasabah di Bank Sampah induk butta toa bantaeng hanya berjumlah 28 nasabah masih dinilai kurang optimal. Bank Sampah induk harusnya bisa merangkep banyak lagi



nasabah agar partisipasi masyarakat lebih optimal dan tentunya akan mendorong output yang lebih maksimal. Sumber daya yang dimiliki Bank Sampah induk butta toa bantaeng dinilai tidak berkembang begitu pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya inovasi pengolahan sampah dan inisiatif dari pengurus Bank Sampah induk butta toa untuk aktif sosialisasi kepada masyarakat untuk bergabung di Bank Sampah induk butta toa bantaeng.

### **V.1.3 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi diperlukan agar tidak terjadi salah pemahaman baik antarorganisasi maupun pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan dapat menangkap apa yang menjadi harapan dari standar dan tujuan kebijakan dan apa yang harus dilakukan. Koordinasi sangat diperlukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana saling terkait dengan karakteristik agen pelaksana dan sikap/kecenderungan agen pelaksana. Agen pelaksana yang menerima kebijakan dan melaksanakannya dengan baik tentu tidak lepas dari koordinasi antar pembuat kebijakan. Koordinasi yang baik tentu membuat agen pelaksana tetap pada jalurnya atau apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan tetap berada pada koridornya.

Ibu I mengatakan bahwa :

*“Dari dinas juga sering datang berkunjung kesini. Kita juga sering diikuti pelatihan dan bimbingan terkait program Bank Sampah”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Ibu R selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya, dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas, membenarkan hal tersebut:

*“Kita melakukan pembimbingan kepada pegurus Bank Sampah disana. Biasanya kalau ada sosialisasi dari dinas lingkungan hidup yang terkait dengan program Bank Sampah itu kita mengundang seluruh perwakilan dari Bank Sampah di Bantaeng. Jadi kalau kordinasi itu kami sering lakukan, bukan cuma saat ada pelatihan saja tapi kami juga rutin mengunjungi Bank Sampah yang ada di Bantaeng.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Bapak S selaku Lurah sebagai pembina juga mengatakan bahwa :

*“soal kordinasi kita tetap lakukan dengan dinas lingkungan hidup. Kalau ada kendala kita bicarakan bersama. Dari dinas juga sering berujung ke Bank Sampah untuk sekedar liat pekerjaannya orang disana sekalian memantau ki. Saya dengan pak made juga sering ketemu karena tetangga juga jadi selaluji cerita-cerita soal Bank Sampah bagaimana.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa kordinasi antara Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng telah melakukan kordinasi dengan baik. Melalui, kegiatan formal ataupun non-formal. Hal tersebut tentu sangat baik dalam membangun kekerabatan dalam masyarakat dengan pihak pemerintah sehingga dapat menumbuhkan keterbukaan dan rasa percaya kepada pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pengertian komunikasi antarorganisasi agar tidak terjadi salah pemahaman baik pengurus Bank Sampah induk butta toa bantaeng maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Pengurus Bank Sampah induk butta toa bantaeng dapat menangkap apa yang menjadi harapan dari standar dan tujuan kebijakan dan apa yang harus dilakukan. Kordinasi sangat diperlukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.

#### V.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Sekretaris Bank Sampah Induk Butta Toa Ibu I mengatakan :

*“Sejaknya Bank Sampah ini dibentuk dan kita ini dipercaya untuk jalankan alhamdulillah sangat bermanfaat. Bukan Cuma bantu lingkungan jadi bersih tapi jadi lebih berguna itu sampah bisa jadi uang. Program begini yang na butuhkan masyarakat yang bisa menghasilkan sama buka lapangan kerja. Masyarakat juga respon baik ini apa-apa. Karena kita sudah rasa manfaatnya jadi kita juga mulai ajak tetangga untuk ikut ini program Bank Sampah, apalagi kan ini Bank Sampah induk jadi terbuka luas untuk semua masyarakat kalau mau kumpul sampahnya disini. Kita juga panggil masyarakat sekitar untuk datang memilah sampah jadi ada kerjaan tambahannya juga”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Ketua Bank Sampah Bapak M menambahkan,

*“Iya program seperti ini harus kita dukung karena benar-benar masyarakat yang kelola dan hasilnya juga kita yang akan rasakan. Saya sendiri setuju dengan program-program yang kayak begini.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Kecocokan para pengurus Bank Sampah induk butta toa bantaeng selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan dari suatu masyarakat. Program Bank Sampah yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya yang dapat mendorong masyarakat untuk sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan tetap mendapat *benefit* dari hal tersebut.

Sejauh ini pelaksanaan program Bank Sampah induk butta toa bantaeng sudah berjalan enam tahun yang tentunya ada pasang surut dalam pelaksanaannya.

Berikut Ibu I mengatakan :

*“kalau keluhan iya selama ini waktu di awal-awal ji yang susah sekali yakinkan masyarakat untuk ikut jadi nasabah karena banyak juga yang belum tau apa itu Bank Sampah. Tapi dari dinas sama sama untuk tarik nasabah dari keluarga dulu baru mau ikut yang lain.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masiih kurangnya kesadaran masyarakat tentang Bank Sampah induk butta toa bantaeng karena krangnya pemahaman terkait Bank Sampah hinduk butta toa. Namun, dapat teratasi dengan kerja sama dari DINas Lingkungan Hidup Kabupatenn Bantaeng dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui keluarga sebagai bahan perconntohan untuk menarik ketertarikan masyarakat lainnya.

Informan S mengatakan bahwa :

*“iye diawal juga saya Cuma disuruh sama pak rt jadi nasabah Bank Sampah. Ternyata sampah ta yang di setor disana bisa ditukar jadi uang atau emas. Tetanggaku ikut-ikutmi juga naliat ternyata adaji tawwa hasilna.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana yang demokratis dan punya upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut sudah dinilai baik sebagaimana kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

### **V.1.5 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Partisipasi masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah dan melakukan kegiatan pemilahan, pengelolaan serta pemanfaatan sampah rumah tangga sudah dapat memberikan dampak yang baik bagi program Bank Sampah ini. Kolaborasi yang diharapkan berkelanjutan agar masyarakat termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam program Bank Sampah dikarenakan melihat banyak manfaat yang didapatkan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta menjaga kelestarian dan menekan kerusakan lingkungan akibat sampah.

#### **V.6.1 Lingkungan Ekonomi**

Dampak ekonomi Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng dapat dilihat dari ada tidaknya manfaat ekonomi berupa tambahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat anggota Bank Sampah.

Menurut Bapak RW S dampak dari program Bank Sampah ini bukan hanya menambah penghasilan serta menjadikan lingkungan lebih bersih namun juga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Lebih jelasnya berikut pernyataan informan Bapak RW S :

*“Saya dukung sekali itu program Bank Sampah induk di Bontosunggu. Termasuk saya juga nasabahnya karena memang bermanfaat sekali untuk masyarakat termasuk saya yang rasakan. Lingkungan jadi bersih,*

*anak-anak juga bisa main dengan aman kalau bersih lingkungan ta begini.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Bapak RT juga mengatakan :

*“Tentunya saya dukung program ini. Banyak warga merasakan manfaatnya terutama ibu-ibu yang tadinya dirumahji sekarang adami na kerja. Biasa istriku juga datang bantu pilah sampah atau biasanya bikin ki kerajinan begitu di sana biasa juga na bawa pulang.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Informan I juga merasakan manfaatnya, sebagaimana ia mengatakan:

*“alhamdulillah karena rajin menabung sampah disana jadi ada pendapatan tambahan juga. Lumayan kalau menabung bisa untuk beli kebuthhan sehari-hari atau uangnya ditabung lagi.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Adapun program Bank Sampah yang nasional yakni program Bank Sampah jadi emas juga sudah mulai dijalankan sejak 2019 di Bank Sampah induk butta toa bantaeng. Program tersebut bekerja sama dengan Pegadaian untuk bisa sampahnya ditukar menjadi emas.

Informan I yaitu salah satu pengelola Bank Sampah mengatakan bahwa :

*“Program Bank Sampah ini sangat bermanfaat, berguna, dan juga membantu. Dampak yang paling saya rasakan itu bertambah penghasilanku. Biasanya saya bisa dapatkan sampai Rp. 70.000 per satu kali penimbangan dan saya sudah bisa beli emas dari hasil tabunganku.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Informan S mengatakan tentang program sampah jadi emas bahwa :

*“Iye saya tau itu program, pernah ji disosialisasikan. adami warga sini yang pernah dapat emas tawwa dari menabung itu sampahnya. Saya masih menabung ini kumpulkan sampah biar bisaka juga tukar emas di pegadaian. Cuma begitumi agak lama baru bisa ditukar karena ta banyakpi terkumpul baru bisa ditukar”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Ibu I juga mengatakan bahwa :

*“Terkait pogram itu sudah ada 10 orang yang sudah tukar sampahnya jadi emas di pegadaian. Tapi memang barupi banyak yang tau itu program waktunya tahun 2020. Tahun 2019 itu barupi dijalankan jadi belum adapi yang tukar itu waktu. Sekarang sudah ada ”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Pelaksanaa program sampah jadi emas ternyata belum maksimal di tahun 2019 karena sosialisasi yang kurang optimal ke masyarakat. Namun, mulai meningkat di tahun 2021 hingga sekarang walaupun berjalan lambat. Keaktifan Masyarakat Kabupaten Bantaeng masih dinilai kurang karena jumlah nasabah yang masih sedikit mengingat Bank Sampah induk Butta Toa Bantaeng sudah berjalan selama lima tahun.

#### V.6.2 Lingkungan Sosial

Partisipasi anggota Bank Sampah Butta Toa Bantaeng ditunjukkan melalui keaktifan mereka melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masing-masing. Sampah dipilah berdasarkan jenis sampah yang telah ditetapkan oleh Bank Sampah, antara lain: kardus, plastik putih (aqua gelas, botol minuman), plastik campur (ember, bedak dll), kertas campur, kaleng aluminium (sprite, cocacola ,milo dll), botol kaca (sirup fresh, kecap). Setelah sampah terpilah dan terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak untuk disetorkan, anggota Bank Sampah kemudian membawa sampahnya ke Bank Sampah atau menghubungi pengurus Bank Sampah lewat telepon atau sms. Keesokan harinya pada hari yang telah ditentukan, keduanya bertemu di lokasi Bank Sampah. Kemudian sampah ditimbang dan dicatat di buku tabungan dan buku kas Bank Sampah. Dampak sosial dari Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan perilaku dalam

penanganan sampah rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya Bank Sampah cukup mempengaruhi mereka untuk memilah sampah.

Dalam meningkatkan sebuah program, pasti dibutuhkan *feedback* dari masyarakat untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan. Program Bank Sampah ini sudah mampu melibatkan masyarakat untuk penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan mendatangkan keuntungan atau nilai ekonomis bagi masyarakat apabila sampah tersebut didaur ulang menjadi sebuah kerajinan atau barang seni (Mujiburrahman, 2014).

Informan I mengatakan tentang Bank Sampah bahwa

*“Saya tau ada program Bank Sampah di dekat rumah saya ini sudah lama. Bagus sekali itu program karena dulu orang buangji itu apa sampah plastik sekarang bisa jadi berguna. Dulu banyak payabo tapi sekarang ada Bank Sampah jadi tidak ada mi itu dibilang payabo-yabo.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Namun, Informan U mengatakan hal yang berbeda bahwa :

*“Iya saya tau itu ada Bank Sampah disana. Saya nasabah disanah tpi dulu ji saya semangat bawa sampahku kesana tapi begitumi tidak bisaki langsung tarik uang ta kalau sudah di timbang, ada nominalnya bilang berapa banyak pi tabungan ta baru bisa cair. Jadi malas ma biasa bawaki kesana.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Informan H juga ternyata merasakan hal yang serupa bahwa :

*“aih terlalu lama baru bisa cair uang ta. Dulu ji pernah memang kumpul sampahku disana karena na bilang tetangga bisaki beng dapat uang ternyata di tabung dulu baru bisa diambil. Jadi tidak pernah ma lagi kesana bawa sampahku. Ku buang ji saja.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)



Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa ternyata masih ada masyarakat yang belum memahami tujuan dari pembentukan Bank Sampah itu. Aparat Pelaksana harusnya terus melakukan sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Bank Sampah untuk mengedukasi pentingnya pengelolaan sampah.

#### V.6.3 Lingkungan Politik

Adapun dampak politik dapat dilihat dari dukungan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam mendorong pelaksanaan program secara optimal agar dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Bank Sampah induk butta toa bantaeng bekerja sama dengan PT. Pegadaian Bantaeng menunjukkan bahwa sudah adanya dorongan dari swasta yang tentu saja akan memberi pengaruh terhadap pelaksanaan program Bank Sampah kedepannya.

Ibu R mengatakan:

*“Bank Sampah induk itu sudah kerjasama dengan pegadaian untuk program sampah jadi emas. Jadi nasabah yang sudah cukup tabungannya bisami ditukar jadi emas di pegadaian.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Informan S juga memberikan dukungannya dengan adanya kerja sama antara Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng dengan PT Pegadaian, sebagaimana berikut :

*“bagus tawwa, jadi lebih tertarikka untuk kumpul sampah lagi walaupun agak lama tapi adaji hasilnya.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa dengan adanya program sampah jadi emas masyarakat pun mulai ikut tertarik untuk menukarkan sampahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Informan S dengan ikut mendukung program tersebut.

#### **V.1.6 Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik yang bersifat *top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Penerimaan atau tidaknya suatu kebijakan terhadap agen pelaksana juga terkait dengan karakteristik agen pelaksana tersebut. Sebagaimana suatu kebijakan menyentuh permasalahan yang ada di masyarakat dan hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Bapak M mengatakan,

*“Seperti yang saya bilang tadi kalau program begini yang dibutuhkan masyarakat karena itu tadi, kita yang kelola ini Bank Sampah dan kita juga yang rasakan hasilnya jadi sangat membantu masyarakat juga. Masyarakat punya kerjaan dan dapat uang juga”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Program ini juga mampu memberdayakan masyarakat dengan cara ikut berperan dalam pengelolaan Bank Sampah ini. Mereka diberikan

pengetahuan mengenai pengelolaan sampah yang baik. Selain menimbang dan pembuatan kerajinan dari sampah

Sikap pengurus Bank Sampah butta toa bantaeng sebagaimana pada indikator sebelumnya yang Ibu I katakan bahwa awalnya masyarakat belum begitu menerima adanya Bank Sampah induk butta toa bantaeng. Namun, hal tersebut mereka atasi dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga sebagai contoh untuk yang lainnya.

Ibu I, mengatakan :

*“yah walaupun memang diawal susah sekali ajak masyarakat tapi alhamdulillah kita pelan-pelan kasi contoh untuk mereka kalau ini hasilnya di Bank Sampah. Itukan sudah jadi budaya disini kalau masyarakat liat tetangganya ikut ini baru hasilnya bagus mulai mi ada ras mau ikut. Ih tawwa bisa ki dapat uang sama emas disitu.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurus Bank Sampah induk butta toa bantaeng memahami budaya di masyarakat agar mengetahui pendekatan apa yang cocok untuk mengatasinya. Hal tersebut sejalan dengan sikap kecenderungan para agen pelaksana menurut Van Metter dan Van Horn dalam memahami permasalahan yang dirasakan masyarakat untuk selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan dari suatu kebijakan.

## **V.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil dilihat dari isi kebijakan itu sendiri dan strateginya. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal, yaitu kualitas kebijakan dan strategi implementasi. Kebijakan yang tidak berkualitas, tidak bermanfaat untuk

diimplementasikan. Strategi implementasi yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu banyak kegagalan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi juga karena strategi implementasinya. (Winarno, 2007)

Bapak N selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa:

*“secara konseptual Bank Sampah itu merupakan turunan dari kebijakan strategi penanganan sampah di bantaeng. Nah, turunan itumi disebut program. Program Bank Sampah sendiri ini program nasional yang memang sudah lama dilaksanakan di bantaeng.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Begitupun Bapak M selaku ketua Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng membenarkan yang dikatakan oleh Bapak N di atas, sebagaimana berikut :

*“iye, ini Bank Sampah memang ada aturannya, kita disini Cuma menjalankan apa yang dari dinas kasih.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng secara substansial sudah memiliki sasaran dan strategi yang tepat dilihat dari Peraturan Bupati Bantaeng No. 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dukungan dari pelaksana dan peran stakeholder sangat mempengaruhi jalannya suatu proses implementasi kebijakan.

Ibu R juga menambahkan, bahwa :

*“iya sebelum dibentuk Bank Sampah kita harus pahami dulu pengurusnya terkait ini program seperti apa dan bagaimana dijalkannya. Penting untuk tahu tujuannya ini Bank Sampah. Jadi bukan Cuma dari kita dinas lingkungan hidup tapi dari pengurus Bank Sampah juga harus mengerti, kan pengharapannya ini program bisa berdayakan masyarakat juga.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Sebagaimana pada hasil wawancara dan observasi sebelumnya menunjukkan kordinasi dan pemahaman antara stakeholder dan pelaksana program Bank Sampah induk butta toa banteng sudah tersampaikan dengan baik. Para pelaksana memahami apa yang menjadi tujuan dari program Bank Sampah tersebut. Begitupun sarana dan prasarana juga disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng kepada Bank Sampah induk butta toa bantaeng.

Dari hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor-faktor penghambat yang diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah Organik

Namun, didapati kendala terkait pengelolaan sampah organik yang kurang optimal dikarenakan proses pengelolaannya dalam pemilahan yang memakan waktu cukup lama sehingga sering diabaikan oleh para pelaksana. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian oleh para stakeholder untuk tetap mengoptimalkan pengolahan sampah organik di Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng. Kapasitas sumber daya dalam melakukan inovasi agar meningkatkan partisipasi masyarakat masih dinilai kurang dengan melihat jumlah data nasabah sebagai representatif partisipasi masyarakat.

b. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Sementara, faktor lain yang menghambat proses implementasi kebijakan Bank Sampah induk butta toa bantaeng sebagaimana mengacu dalam buku Wahab (2012) terkait faktor eksternal meliputi keuangan, logistic, informasi, legitimasi dan partisipasi. Pada program Bank Sampah

induk butta toa bantaeng dalam faktor eksternalnya masih kurang berjalan dengan baik, Dalam hal partisipasi dan informasi masih dinilai kurang dalam pengaplikasiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara Bapak M bahwa :

*“Untuk sampai saat ini nasabah ada 28 orang. Hampir aktif semua, kadang ada satu dua orang yang malas setor sampahnya atau kadang ada kesibukannya diluar jadi tidak sempat mi urus sampahnya.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Ibu R juga mengomentari terkait jumlah nasabah sebagaimana berikut :

*“iya itu juga jadi kendala kita untuk tarik masyarakat ikut Bank Sampah. Harapanta dengan kerja sama pegadaian untuk program sampah jadi emas.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Kurangnya nasabah Bank Sampah induk butta toa bantaeng yang hanya 28 nasabah selama lima tahun ini menggambarkan kurang aktifnya partisipasi masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam mengelola sampahnya melalui Bank Sampah. Jumlah nasabah Bank Sampah butta toa bantaeng terbilang cukup sedikit mengingat Bank Sampah induk butta toa bantaeng adalah Bank Sampah besar yang membawahi unit Bank Sampah lainnya di Kabupaten Bantaeng.

Ibu I menanggapi masalah partisipasi tersebut sebagai berikut :

*“kita memang agak susah kalau soal yakinkan masyarakat ikut ini Bank Sampah. Itumi tadi saya katakana toh kalau masyarkat sini maupi kalau adapi dia liat hasilnya. Tapi kita juga tetap usaha untuk kasi yakin masyarakat dengan ajak keluarga dulu baru kalau na lliatmi tetangganya maumi itu.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2021)

Hal tersebut sangat mempengaruhi proses implementasi dari kebijakan program Bank Sampah induk butta toa bantaeng. Apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program Bank Sampah tidak berjalan maksimal. Landasan dari suatu Bank Sampah adalah partisipasi masyarakat. Hal seperti itu tentunya membutuhkan dorongan dari stakeholder untuk mendorong kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah guna menjalankan program kementerian lingkungan hidup lingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

c. Faktor Penghambat Sosialisasi ke Masyarakat

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat kurang dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih kurang memahami dan kurang tertarik dengan bank sampah. Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng sendiri masih kurang dalam sosialisasi ke masyarakat, hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara Informan U yang bahwa :

*“Iya saya tau itu ada Bank Sampah disana. Saya nasabah disanah tpi dulu ji saya semangat bawa sampahku kesana tapi begitumi tidak bisaki langsung tarik uang ta kalau sudah di timbang, ada nominalnya bilang berapa banyak pi tabungan ta baru bisa cair. Jadi malas ma biasa bawaki kesana.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Informan H juga ternyata merasakan hal yang serupa bahwa :

*“aih terlalu lama baru bisa cair uang ta. Dulu ji pernah memang kumpul sampahku disana karena na bilang tetangga bisaki beng dapat uang ternyata di tabung dulu baru bisa diambil. Jadi tidak pernah ma lagi kesana bawa sampahku. Ku buang ji saja.”*

(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang memahami tujuan dari bank sampah sehingga kurang tertarik untuk ikut berpartisipasi menjadi nasabah Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Program Bank Sampah mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah sampah serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam program Bank Sampah ini, masyarakat bukan hanya sebagai pendukung saja di program ini melainkan juga terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga dimanfaatkan dan diolah sesuai jenis kemudian masyarakat mendapatkan nilai ekonomis. Program Bank Sampah ini juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk mencapai lingkungan yang bersih.
- Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis bisa mengambil kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Pelibatan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng yaitu belum berjalan maksimal terutama pada aspek lingkungan sosial dalam hal partisipasi masyarakat yang masih kurang sehingga manfaatnya belum dirasakan secara menyeluruh. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan Pengurus Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng telah memahami tujuan dan sasaran dari program Bank Sampah, namun sosialisasi ke masyarakat masih dinilai kurang optimal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan akan berdampak juga pada jumlah sampah yang tidak menurun secara signifikan

berdasarkan pada data sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.

- Dampak dari aspek ekonomi, pendapatan masyarakat yang mengikuti program dapat dikatakan meningkat semenjak adanya program ini. Dari aspek politik juga mendapat dukungan dengan adanya kerja sama PT Pegadaian Bantaeng pada program Bank Sampah jadi emas. Namun, kembali lagi pada tujuan utama dari program sampah melalui pelibatan masyarakat harusnya partisipasi masyarakat menjadi sorotan pada program Bank Sampah tersebut.
- Faktor-faktor yang mendukung berjalannya Bank Sampah induk butta toa bantaeng yakni pemerintah Kabupaten Bantaeng menyediakan sarana dan parasarana Bank Sampah seperti tempat Bank Sampah, penimbang sampah dan kendaraan untuk mengangkut sampah.
- Adapun yang menjadi faktor penghambat berjalannya Bank Sampah adalah sebagai berikut :
  - Pengelolaan sampah organik yang kurang optimal karena kapasitas sumber daya manusia yang kurang memumpuni dalam mengolahnya, serta sarana truk yang menghambat proses pengangkutan sampah organik.
  - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan Bank Sampah sehingga kurangnya partisipasi masyarakat. Peran aktif stakeholder sangat diperlukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berperan aktif pada program tersebut. Meskipun

memberikan dampak bagi masyarakat, namun program tetap saja tidak berjalan optimal apabila tujuan utamanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah melalui Bank Sampah tidak merata. Meskipun agen pelaksana dan stakeholder memahai tujuan dari pelaksanaan program Bank Sampah tersebut tidak cukup untuk mendorong kesadaran masyarakat agar berpartisipasi.

- Kurangnya sosialisasi dari para tokoh masyarakat dan stakeholder membuat kurang berpartisipasinya masyarakat dalam program tersebut.

## **VI.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis bermaksud memberi saran terhadap program Bank Sampah induk butta toa bantaeng bahwa perlunya pemaksimalan sosialisasi ke masyarakat agar tingkat partisipasi meningkat. Sosialisasi bisa dilakukan dengan memasang baliho ataupun poster mengenai kesadaran akan kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum, dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat bisa lebih sering dilakukan dan sosialisasi melalui media elektronik seperti di televisi dan radio agar implementasi pengelolaan sampah dapat berjalan baik. Serta perlunya peningkatan sumber daya manusia dengan keterampilan dalam mengelola sampah organik dan penyuluhan serta pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ag. Subarsono, M. M. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alamsyah. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dedi Mulyadi Drs., M. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hill, M., & Hupe, P. (2009). *Implementing Public Policy*. Singapore: Sage.
- Jamaluddin Ahmad, S. M. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Rappang: Gava Media.
- Leo Agustino S.Sos., M. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Amelia Press: Amelia Press.
- M. Iqbal Hasan, M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M.Si, D. A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elexmedia Komputindo.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Sugiyono, P. D. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, D. U. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Capiya Publishing.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

Wahab, H. S. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Peraturan :**

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

**Jurnal :**

Carl Van Horn, D. V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: *Administration Society*. *clvi*, 6 no.4, 445-485.

Sulistiyorini; Nur Rahmawati, Rudi Saprudin Darwis, Arie Surya Gutama. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Social Work Journal*, v. 5, p. 73-74.

Kurnia, Marlina; Siti Noor Khikmah, Farida. (2015). Evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *University Research Coloquium*, p. 217-226.

**Sumber dari internet :**

Badan Pusat Statistik Kab. Bantaeng. Jumlah Penduduk Kab. Bantaeng  
<https://bantaengkab.bps.go.id/dynamictable/2018/10/25/31/jumlah-penduduk-di-kabupaten-bantaeng-jiwa-2011---2018.html> (diakses 17 Oktober 2020)

Internet World Stats.com. Penduduk terpadat di dunia  
<https://www.internetworldstats.com/stats8.html> (diakses 11 Oktober 2020)

National Geographic. Pengelolaan Sampah  
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132298218/pengelolaan-sampah-di-indonesia-masih-buruk-perlu-kolaborasi-dan-revolusi?page=all> (diakses 22 Oktober 2020)

News Detik.com. Timbunan Sampah Indonesia  
<https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton> (diakses 17 Oktober 2020)

*Tagar.com*. Sampah jadi Emas

<https://www.tagar.id/di-bantaeng-kini-sampah-bisa-ditukar-emas> (diakses 20 Oktober 2020)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Daftar Nama Nasabah Bank Sampah Butta Toa Bantaeng

No	Nasabah	Alamat
1	Abd. Karim	Sasayya
2	Abd. Rauf	Jln Sungai Calendu
3	Abd. Salam	Jln Sungai Bialo
4	Abdul Rauf	Jln Nenas
5	Abdul Samad	Jln Ratulangi
6	Ad. Siregar	Bissappu
7	Agustam	Panaikang
8	Ahmad Yusran	Jalan Delima
9	Ahmadi	Jalan Rambutan
10	Ambo Tang	Jalan Delima
11	Aming	Lamalaka
12	Andi Mararengi	Borkal
13	Baharuddin	Lamalaka
14	Budiawan	Bissappu
15	Dian	Sasayya

16	Fikri	Panaikang
17	Fitri	Sasayya
18	Hardinar	Kaili
19	Ikhsan Dg. Palallo	Borkal
20	Ikram	Sasayya
21	Jupri	Jln Seruni
22	Mukmin	Jln Mangga
23	Riswandi	Kaili
24	Sofyan	Kaili
25	Supriadi	Sasayya
26	Syamsuddin	Jln rambutan
27	Usman	Kaili
28	Yusran	Sasayya



## DOKUMENTASI



**Motor Pengangkut Sampah Bank Sampah Butta Toa Bantaeng**



**Suasana bagian dalam Bank Sampah Butta Toa Bantaeng**



**Sampah yang sudah dipilah**



**Masyarakat ikut dalam proses pemilahan sampah**



## **Dokumentasi dengan Para Informan**



**Dokemntasi dengan Bapak M selaku Ketua Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng**



**Dokemntasi dengan Ibu I selaku Sekretaris Bank Sampah Induk Butta Toa Bantaeng**

## Dokumentasi dengan Informan









Dokumentasi Bersama Bapak N Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantaeng



Dokumentasi Bersama I selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya, dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas